

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan koperasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) yang berisi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Selaras dengan pernyataan tersebut koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang seorang dan sangatlah jelas bahwa koperasi mempunyai peran untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi yang melakukan kegiatannya dengan berorientasi pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya berdasar kan jatidiri koperasi.

Pada tahun 1947 ditetapkannya 12 Juni sebagai hari lahirnya Koperasi di Indonesia yang bertempat di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya. Perkembangan koperasi di Jawa Barat sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah koperasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilansir dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah koperasi di Jawa Barat pada tahun 2019 sebanyak 13.247 koperasi, pada tahun 2020 terdapat 14.706 koperasi dan pada tahun 2021 terhitung sebanyak 15.621 koperasi.

Koperasi di Jawa Barat dapat menjadi basis perekonomian yang baik jika dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip koperasi. Di Jawa Barat koperasi tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, wilayah paling tinggi koperasinya yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur dan disusul oleh Bandung. Terhitung sampai tahun 2021 jumlah koperasi yang aktif di Bandung sebanyak 731 dengan jumlah anggota sebanyak 115.760 orang dan dapat menghasilkan omzet mencapai Rp. 1,5 triliun serta aset lebih dari Rp. 1,7 triliun. Dengan hasil omzet yang cukup besar koperasi di Jawa Barat bukan berarti harus berdiam diri, melainkan koperasi di Jawa Barat harus bisa menjadi contoh koperasi yang baik.

Tamba (2004) menyatakan “Koperasi dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan jenis usahanya: koperasi produksi, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi multi-usaha.” Di antara banyak jenis koperasi yang sedang berkembang di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan ataupun untuk membangun usahanya

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Provinsi Jawa Barat merupakan koperasi yang bergerak di bidang penjualan barang - barang primer (pakaian dan bahan baku) sesuai dengan kebutuhan karyawan dan jasa simpan pinjam. KKBD Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung yang beranggotakan karyawan yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. KKBD Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam Koperasi Primer. Tujuan koperasi ini yaitu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi anggotanya.

Koperasi simpan pinjam dapat menambah modal sendiri. Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyetorkan modal dari anggota yang bersangkutan. Bisnis simpan pinjam adalah bisnis yang sangat terkonsentrasi, dan peminjaman membutuhkan aturan akuntansi yang tepat untuk transaksi simpan pinjam. Rekening tabungan dan pinjaman membantu ketua koperasi untuk memutuskan kemungkinan meminjamkan kepada anggota koperasi.

Pemberian pinjaman kepada anggota tentunya akan menimbulkan piutang. Piutang usaha merupakan modal yang diharapkan dapat meningkatkan laba dan pendapatan. Namun, pinjaman juga dapat mewakili risiko bisnis jika tidak dikelola sesuai dengan prosedur koperasi untuk pengakuan, evaluasi, pengakuan, penyajian dan pelaporan keuangan koperasi. Terlebih lagi pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Provinsi Jawa Barat pemberian pinjaman sangat membantu dan diminati oleh para anggota.

Dalam pemberian pinjaman sering kali Koperasi dihadapi dengan masalah Mutasi karyawan Bapenda ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang menyebabkan Karyawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaannya di Koperasi Keluarga Besar Disependa (KKBD) Provinsi Jawa Barat. Mutasi Karyawan Bapenda yang merupakan anggota KKBD Provinsi Jawa Barat kadang kala bertepatan pada saat karyawan tersebut masih memiliki pinjaman di Koperasi. Oleh karena itu, Koperasi Keluarga Besar Disependa (KKBD) Provinsi Jawa Barat harus selalu memperhatikan prosedur perlakuan akuntansi piutang.

**Table 1.1 Perkembangan Volume Pinjaman, Jasa dan Piutang di KKBD
Provinsi Jawa Barat**

Tahun	Pinjaman	N/T (%)	Jasa	%	Piutang	N/T (%)
2017	30.278.770.000	-	2.278.565.090	-	11.490.034.725	-
2018	28.384.625.000	- 6,26	2.660.333.417	16,75	12.328.775.625	7,30
2019	19.659.756.000	-30,74	2.665.438.395	0,19	9.778.536.425	-20,6
2020	10.115.411.000	-48,55	1.414.471.675	-46,93	4.803.922.925	-50,92
2021	9.049.734.250	-10,54	862.602.688	-39,02	3.948.511.187	-17,81

Sumber: RAT 2017 - 2021

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa volume pinjaman, jasa dan piutang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Perubahan volume tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena penurunan anggota yang disebabkan oleh mutasi karyawan Bapenda Provinsi Jawa Barat. Walaupun

perkembangan volume piutang menurut tetapi tetap saja terdapat kredit macet pada KKBD Provinsi Jawa Barat.

Table 1.2 Kredit Bermasalah pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Povinsi Jawa Barat

Tahun	Piutang	Kredit Bermasalah	(%)
2017	Rp. 11.490.034.725	Rp. 266.435.588	2,32%
2018	Rp. 12.328.775.625	Rp. 200.700.999	1,63%
2019	Rp. 9.778.536.425	Rp. 166.050.619	1,70%
2020	Rp. 4.803.922.925	Rp. 83.064.950	1,73%
2021	Rp. 3.948.511.187	Rp 51.817.732	1,31%

Sumber : Wawancara dengan Pihak Koperasi

Berdasarkan tabel 1.2 masih terjadi kredit bermasalah dengan nominal yang cukup besar disetiap tahunnya. Kredit bermasalah ini terjadi karena anggota yang di mutase ke OPD lain masih memiliki kredit di Koperasi. Kondisi ini yang membuat munculnya kredit bermasalah yang seharusnya tidak terjadi pada koperasi yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pegawai BAPENDA JABAR. Dimana seharusnya para anggota KKBD membayar kredit ataupun simpanan wajib secara tepat waktu melalui pemotongan gaji secara langsung, tetapi karena adanya mutase ini anggota yang memiliki kredit tidak bisa langsung membayar melalui pemoongan gaji. Maka dari itu pentingnya memperhatikan perlakuan akuntansi piutang pada KKBD Provinsi Jawa Barat dalam perlakuan akuntansi atas piutang usaha, piutang akan diatur dalam pengungkapannya dan diukur secara maksimal,

diungkapkan dengan baik, dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjadi informasi penunjang yang dimiliki oleh Koperasi. Dengan diterapkannya perlakuan akuntansi yang tepat kualitas Laporan Keuangan Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) pun akan meningkat menjadi lebih baik lagi. Maka berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis memfokuskan penulisan Skripsi ini dengan Judul **“EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PIUTANG USAHA (Studi Kasus Pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang yang sesuai dengan PERMENKOP dan SAK ETAP.
2. Upaya - upaya apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki perlakuan akuntansi atas piutang usaha di koperasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui penerapan perlakuan akuntansi piutang usaha pada KKBD.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang yang sesuai dengan

PERMENKOP DAN SAK ETAP.

2. Upaya - upaya apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki pencatatan akuntansi atas piutang usaha di koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan pengalaman baik dari pengetahuan teoritis maupun praktis.
- b. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi koperasi, para pengurus dan karyawan koperasi, sebagai bahan evaluasi juga sebagai sarana informasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan sistem manajemennya dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang bagi pihak manajemen koperasi.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini pun diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dan peneliti lainnya, sebagai sarana yang dapat menambah pengetahuan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.